

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, serta dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik spesifiknya pajak daerah di Provinsi Bali. Bali adalah salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota madya, yaitu Kota Denpasar yang sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Bali (Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1, 2024).

Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Provinsi Bali merupakan destinasi wisata peringkat dua dunia versi TripAdvisor (*Traveler Choice Award for Destination*) mengungguli London dan Paris dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2022 dan 2023 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, indikator penilaian dari *Traveler Choice Award for Destination* yaitu berdasarkan kualitas dan kuantitas akomodasi, restoran, serta kategori yang lainnya. Provinsi Bali memiliki pemandangan pantai yang menakjubkan serta panorama alam yang autentik dan asri seperti Ubud (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023).

Selain memiliki panorama alam yang indah, Provinsi Bali terkenal dengan seni serta budayanya. Seperti upacara keagamaan sakral yang hampir dilakukan setiap tahunnya di Pura Besakih yang merupakan salah satu pura terbesar di Asia Tenggara. Pakaian tradisional, persembahan bunga, dan aroma dupa yang menjadi bagian dari pelaksanaan upacara sakral tersebut. Tarian – tarian Bali seperti Tari Kecak dan Tari Barong yang merupakan budaya turun temurun dengan setiap gerakan yang sangat indah dan detail serta diiringi oleh musik gamelan untuk

menampilkan keseimbangan spiritual serta estetika dari kesenian tersebut (CNN Indonesia, 2022). Keindahan seni rupa di Bali juga tidak kalah menakjubkannya. Dilihat dari patung serta ukiran kayu yang menawan juga menjadi indikator yang membuat Bali terkenal di seluruh dunia. Desa Ubud dan Desa Mas menjadi tempat yang paling dikenal dalam menghasilkan karya dengan sentuhan mistis (CNN Indonesia, 2022).

Jenis Pajak daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok. Untuk pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota/Kabupaten lebih banyak dari Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022).

Pajak daerah provinsi merupakan instrumen yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pemerintah terutama pemerintah, yang dimana setiap provinsi di Indonesia sudah memiliki wewenang untuk mengelola pajak dalam wilayahnya sendiri. Pajak daerah berfungsi untuk meningkatkan penerimaan daerah, melaksanakan pembangunan infrastruktur yang masih kurang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada wilayah provinsi Bali (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022).

Tabel 1.1 Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Dalam Miliar)

Kota/Tahun	Pajak Daerah					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Badung						
Anggaran	Rp. 4.989	Rp. 6.235	Rp. 4.760	Rp. 2.309	Rp. 1.667	Rp. 5.830
Realisasi	Rp. 3.872	Rp. 4.217	Rp. 1.613	Rp. 1.278	Rp. 3.210	Rp. 5.676
Persentase	77,62%	67,63 %	33,90%	55,37%	192,51%	97,37%
Kabupaten Bangli						
Anggaran	Rp. 16,27	Rp. 19,80	Rp. 25,80	Rp. 15,74	Rp. 17,38	Rp. 49,24

Bersambung

Sambungan

Realisasi	Rp. 20,74	Rp. 22,36	Rp. 20,54	Rp. 23,32	Rp. 36,71	Rp. 52,32
Persentase	127,46%	112,93%	79,63%	148,18%	211,18%	106,25%
Kabupaten Buleleng						
Anggaran	Rp. 151,46	Rp. 174,65	Rp. 181,40	Rp. 145,68	Rp. 157,68	Rp. 183,20
Realisasi	Rp. 133,65	Rp. 155,76	Rp. 118,26	Rp. 136,71	Rp. 172,69	Rp. 221,54
Persentase	88,24%	89,18%	65,19%	93,85%	109,52%	120,93
Kabupaten Gianyar						
Anggaran	Rp. 533,32	Rp. 723,24	Rp. 888,02	Rp. 619,97	Rp. 524,37	Rp. 914,87
Realisasi	Rp. 578,94	Rp. 742,54	Rp. 323,63	Rp. 241,68	Rp. 597,62	Rp. 1.130
Persentase	108,55%	102,67%	36,44%	38,98%	113,97%	123,52%
Kabupaten Jembrana						
Anggaran	Rp. 43,98	Rp. 43,98	Rp. 43,98	Rp. 40,98	Rp. 41,51	Rp. 48,64
Realisasi	Rp. 34,94	Rp. 39,13	Rp. 34,37	Rp. 38,13	Rp. 48,79	Rp. 90,23
Persentase	79,4%	88,97%	78,15%	93,04%	117,53%	185,52%
Kabupaten Karangasem						
Anggaran	Rp. 116,50	Rp. 149,13	Rp. 128,83	Rp. 124,44	Rp. 118,33	Rp. 142,33
Realisasi	Rp. 92,00	Rp. 108,37	Rp. 66,51	Rp. 85,67	Rp. 167,96	Rp. 232,15
Persentase	78,96%	72,67%	51,62%	68,84%	141,94%	163,11%
Kabupaten Klungkung						
Anggaran	Rp. 44,52	Rp. 56,44	Rp. 77,47	Rp. 52,78	Rp. 37,11	Rp. 60,09
Realisasi	Rp. 60,61	Rp. 77,61	Rp. 41,85	Rp. 41,93	Rp. 66,96	Rp. 113,70
Persentase	136,15%	137,52%	54,02%	79,45%	180,47%	189,20%
Kabupaten Tabanan						
Anggaran	Rp. 100,64	Rp. 105,59	Rp. 147,33	Rp. 115,76	Rp. 130,76	Rp. 168,40
Realisasi	Rp. 97,93	Rp. 116,00	Rp. 97,07	Rp. 144,57	Rp. 175,84	Rp. 241,21
Persentase	97,31%	Rp. 109,86%	65,89%	124,88%	134,47	143,24%
Kota Denpasar						
Anggaran	Rp. 590,50	Rp. 663,20	Rp. 728,20	Rp. 460,00	Rp. 562,21	Rp. 713,25
Realisasi	Rp. 723,76	Rp. 800,36	Rp. 489,69	Rp. 521,85	Rp. 690,25	Rp. 967,59
Persentase	122,57%	120,68%	67,25%	113,45%	122,77%	135,66%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), Kabupaten Badung pada tahun 2018 target anggaran sebesar 4,9 triliun namun yang hanya terealisasi hanya 3,8 triliun dengan presentase realisasi 77,62%. Pada tahun 2019, realisasi anggaran masih kurang dari target anggaran dengan persentase 67,63%. Pada tahun 2020 realisasi kembali lagi tidak melampaui target anggaran

dengan presentase 33,90%. Realisasi anggaran pada tahun 2021 masih dibawah target anggaran dengan presentase 55,37%. Pada tahun 2022 realisasi anggaran Kabupaten Badung melampaui target anggaran yaitu sampai 3,2 triliun dengan presentase 192,51%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi anggaran hingga 5,6 triliun dengan presentase 97,37%. Dapat dilihat berdasarkan data diatas, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan presentase 33,90%. Hal tersebut menunjukkan inkonsisten dalam pengumpulan pajak. Pada Kabupaten Bangli penerimaan pajak relative lebih stabil. Realisasi anggaran dibawah target anggaran pada Kabupaten Bangli hanya terjadi pada tahun 2020 dengan presentase 79,63% dan kembali lagi meningkat pada tahun 2022 dan 2023. Serta dapat dilihat berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 realisasi anggaran mengalami kenaikan paling drastis hingga mencapai presentasi 211,18%. Secara umum, Kabupaten bangli sering melampaui target anggaran. Sama seperti Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng juga relative stabil dengan sedikit peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasi anggaran berada dibawah target anggaran, namun mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan pada akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya serta realisasi anggaran berada diatas target anggaran dengan masing – masing presentase 109,52% dan 120,93%. Dapat dilihat bahwa realisasi anggaran terendah terdapat pada tahun 2020 dan realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2023. Pada Kabupaten Gianyar, pada tahun 2018 dan 2019 realisasi anggaran terdapat diatas target anggaran dengan presentase 108,55% dan 102,67%. Dan terjadi penurunan paling drastis pada tahun 2020 dan 2021 dengan realisasi anggaran sebesar 323 miliar dan 241 miliar dengan presentase 36,44% dan 38,98% hingga mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 597 miliar dan 1,1 triliun dengan presentase 113,97% dan 123,52%. Realisasi anggaran Kabupaten Jembrana dari tahun 2018 hingga tahun 2021 berada dibawah target anggaran. Dan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan hingga realisasi anggaran berada diatas target anggaran yaitu dengan persentase 117,53% dan 185,52% yang menjadikan pencapaian Kabupaten Jembrana yang paling tinggi

selama 6 tahun kebelakang. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2023, penerimaan apajak Kabupaten Jembrana telah membaik dari tahun sebelumnya. Pada Kabupaten Karangasem, menlami fluktuatif dengan penurunan paling drastic pada tahun 2020 dengan target anggaran 128 miliar, namun hanya terealisasi sebesar 66 miliar dengan presentase 52,62%. Dan peningkatan terbaik terdapat pada tahun 2023 yaitu dengan realisasi anggaran mencapai 232 miliar dengan presentase 163,11%. Realisasi anggaran Kabupaten Klungkung terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 41,85 miliar dengan presentase 54,02%. Dan peningkatan terbesar terdapat pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar 113,70 miliar dengan presentase 189,20%. Hal tersebut menunjukkan pencapaian yang meningkat setelah terjadinya penurunan di Kabupaten Klungkung. Pencapaian tertinggi pada Kabupaten Tabanan terdapat pada tahun 2023 dengan presentase 143,24% dan presentase terkecil terdapat pada tahun 2020 sebesar 65,98%. Berdasarkan data pada tabel, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak pada tahun 2022 dan 2023. Terakhir pada Kota Denpasar mengalami penerimaan pajak yang konsisten meningkat dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020. Peningkatan realisasi anggaran paling tinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 967,59 miliar dengan presentase 135,66%.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota mengalami pemulihan penerimaan pajak daerah yang signifikan setelah terjadinya pandemi virus corona, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2020 terlihat menjadi tahun dengan penurunan yang tajam pada penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali yang kemungkinan disebabkan oleh pandemic Virus Corona. Kabupaten Bangli, Gianyar, Klungkung, dan Kota Denpasar secara konsisten mengalami kenaikan hingga melampaui target penerimaan pajak daerah pada masing – masing Kabupaten dan Kota. Hal tersebut menunjukkan kabupaten dan kota tersebut mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik. Namun, untuk Kabupaten Badung, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan menunjukkan fluktuasi yang besar dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah, yang mungkin memerlukan evaluasi untuk mencapai stabilitas dalam penerimaan pajak daerah. Meskipun terjadi penurunan penerimaan pajak daerah

khususnya pada tahun 2020 dan 2021, tren peningkatan penerimaan pajak daerah mengalami pemulihan dan peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut menunjukkan setiap daerah yang terdapat di Provinsi Bali berhasil melakukan strategi pengumpulan pajak dan juga mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional khususnya kondisi pandemic Virus Corona.

1.2 Latar Belakang

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Di Bali, penerimaan pajak daerah memainkan peran yang sangat penting, terutama mengingat potensi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata dan perdagangan (Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1, 2024). Perekonomian Bali bergantung pada industri pariwisata yang telah dikenal di seluruh dunia dan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Penerimaan pajak daerah digunakan pada penelitian ini dikarenakan pajak daerah terutama pajak hiburan memiliki tarif sebesar 35% pada tahun 2009 hingga tahun 2022 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009). Serta pajak hiburan mengalami kenaikan pada tarif hiburan pada tahun 2023 menjadi 40% (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40, 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah Bali secara berkelanjutan mengembangkan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022). Pada kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli serta Kota Denpasar, jenis pajak yang dipungut yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Untuk kabupaten Gianyar, Badung, dan Karangasem jenis pajak yang dipungut sama, namun terdapat satu jenis pajak yang tidak dipungut yaitu pajak sarang burung walet. Dan untuk kabupaten klungkung, jenis pajak yang dipungut juga sama kecuali Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan pajak kesenian dan hiburan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35, 2023). Kebijakan perpajakan yang efektif

dapat memastikan bahwa aliran pendapatan dapat dimaksimalkan tanpa membebani dunia usaha dan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan fiskal yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Direktorat Jendral Pajak, 2023).

Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bali Tahun 2014-2023



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

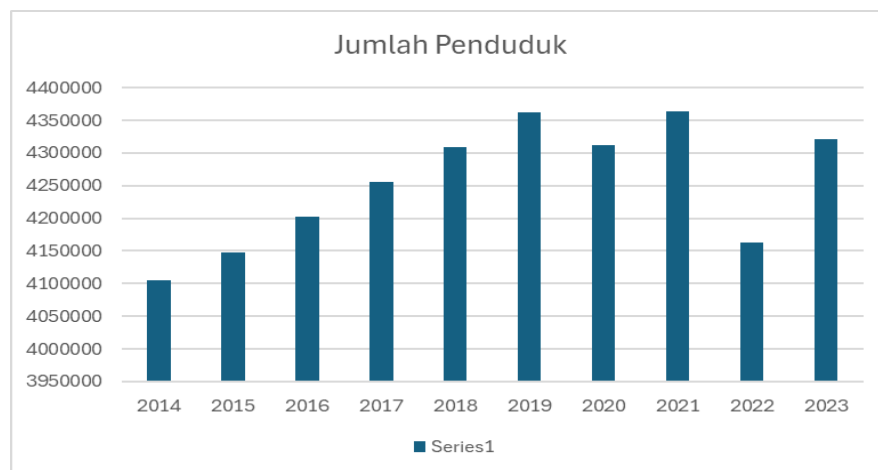
Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 hingga 2023 dalam satuan miliar rupiah. Terlihat bahwa terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga 2019, dengan nilai penerimaan meningkat dari Rp3.506,07 miliar pada 2014 menjadi Rp6.279,13 miliar pada 2019. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah dan efektivitas pemungutan pajak yang semakin baik selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan tajam, yaitu masing-masing menjadi Rp2.804,92 miliar dan Rp2.511,86 miliar, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah. Setelah itu, penerimaan kembali menunjukkan pemulihan pada 2022 (Rp5.166,82 miliar) dan melonjak tajam pada 2023 hingga mencapai Rp8.724,70 miliar. Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat serta kemungkinan peningkatan efektivitas kebijakan perpajakan daerah pasca-pandemi.

Pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan, termasuk pajak daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, serta mengurangi ketergantungan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022). Dan pada undang – undang tersebut menjelaskan dirancangnya undang – undang khusus untuk desentralisasi fiskal adalah agar hasil pajak daerah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Pada penelitian ini, faktor – faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah yaitu jumlah penduduk, investasi infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi (Undang-Undang Republik Indonesia No 1, 2022).

Faktor pertama yaitu jumlah penduduk di Provinsi Bali. Jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang menempati wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan (Badan Pusat Statistiik, 2020). Pendatang dapat dianggap sebagai penduduk yaitu ketika mereka berada di suatu wilayah dengan lama kurang dari 3 sampai 6 bulan (Badan Pusat Statistiik, 2020). Jumlah penduduk di Provinsi Bali mengalami peningkatan baik migran dari dalam negeri. Bali menarik banyak imigran dari dalam negeri untuk membangun usaha di sektor pariwisata (Badan Pusat Statistiik, 2020). Selain itu, imigran dari luar negeri seperti contohnya imigran dari Negara Rusia yang membuat kampung di Bali yang sama – sama membangun usaha mereka di sektor pariwisata (CNBC, 2023). Penelitian Fiki Rachman, Nazief Nirwanto, dan Aris Siswati pada tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dimana jika jumlah penduduk mengalami kenaikan maka pajak daerah juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika jumlah penduduk mengalami penurunan maka penerimaan pajak daerah juga mengalami penurunan (Rachman Asy dkk., 2020). Namun menurut penelitian Rizkan Saniah pada tahun 2023 menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan

kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pada hasil penelitian pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah (Rizqan Saniah et al., 2023).

Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bali Tahun 2014-2023



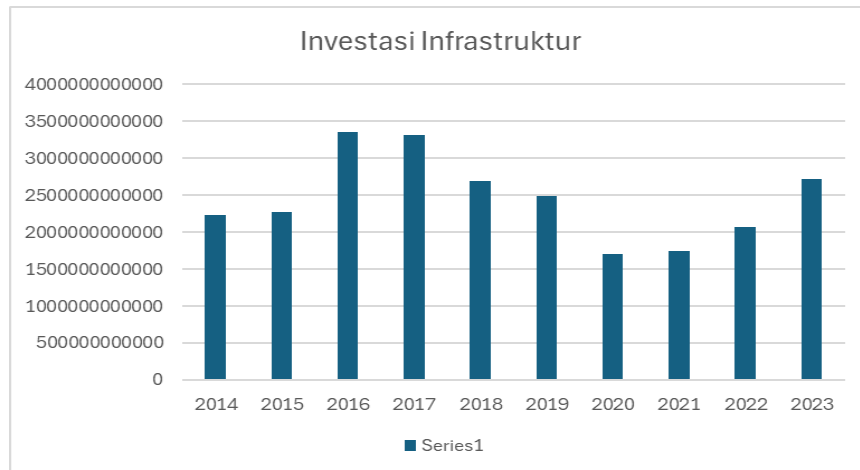
Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2014 hingga 2023. Secara umum, terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami tren kenaikan dari tahun 2014 (sekitar 4.100.000 jiwa) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dan 2021, yaitu sekitar 4.360.000 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang stabil selama enam tahun pertama, kemungkinan disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dan tingkat migrasi yang positif. Namun, terdapat penurunan jumlah penduduk yang cukup mencolok pada tahun 2022, di mana jumlahnya turun drastis ke bawah 4.200.000 jiwa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi keluar daerah, dampak pandemi, atau revisi data sensus. Pada tahun 2023, jumlah penduduk kembali meningkat ke angka sekitar 4.320.000 jiwa, yang menunjukkan tanda pemulihan atau perubahan demografis yang terjadi setelah tahun sebelumnya. Grafik ini mengilustrasikan dinamika populasi yang berfluktuasi dalam satu dekade terakhir.

Faktor kedua yaitu Investasi infrastruktur. Investasi Infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, memiliki peran yang

sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Infrastruktur yang memadai bukan hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, namun juga membuka peluang investasi yang lebih besar. Sebagai contoh pembangunan kereta bawah tanah oleh Provinsi Bali serta renovasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dengan meningkatnya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, infrastruktur yang berkembang pesat dapat memberikan dorongan yang signifikan terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan aktivitas ekonomi baru, seperti pendirian usaha serta meningkatkan kegiatan perdagangan, yang nantinya dapat memperluas basis pajak daerah. Semakin besar basis pajak, semakin tinggi juga potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah (Kementerian Perhubungan, 2024). Pada tahun 2022 sebanyak 100 miliar dolar uang Indonesia tidak di laporkan kepada pihak otoritas yang berwenang serta digelapkan di luar negeri yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan negara lain (Darma dkk., 2022). Pada penelitian Cerly M. Mongdong, Vecky A.J. Masinambow, dan Steeva Tumangkeng pada tahun 2020 menyatakan bahwa investasi infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Dijelaskan bahwa, infrastruktur jalan naik sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 3,56% (Mongdong dkk., 2020). Menurut Gusti Ayu Yesilla tahun 2018 menyatakan bahwa investasi infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Gusti Ayu Yessila Xena et al., 2021). Meskipun pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan publik, pada penelitian tersebut tidak terdapat bukti yang cukup dalam menunjukkan bahwa investasi infrastruktur meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih belum sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur untuk melakukan kegiatan ekonomi (Mongdong dkk., 2020).

**Grafik Investasi Infrastruktur Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bali
Tahun 2014-2023**

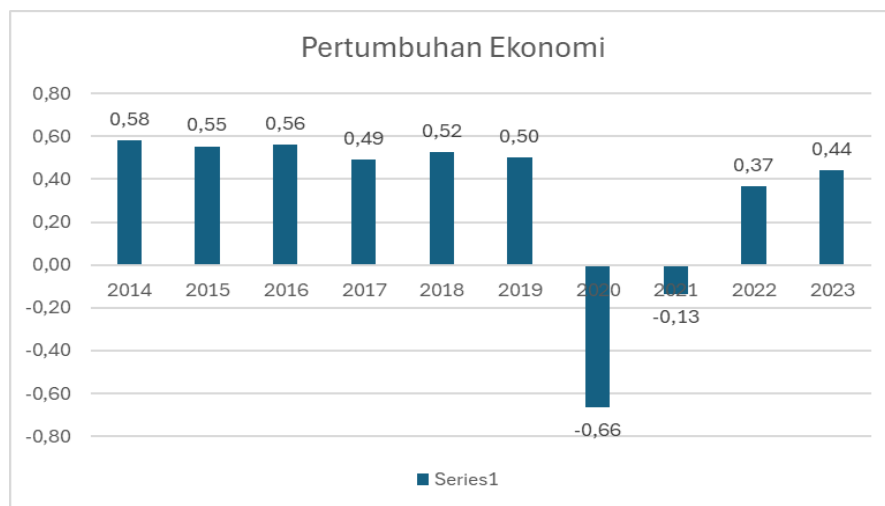


Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan investasi infrastruktur dari tahun 2014 hingga 2023. Terlihat bahwa pada awal periode (2014–2015), nilai investasi berada di kisaran Rp220 triliun hingga Rp230 triliun. Investasi mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2016 dan 2017, masing-masing menyentuh angka tertinggi sekitar Rp330–340 triliun. Ini menunjukkan adanya komitmen besar terhadap pembangunan infrastruktur di tahun-tahun tersebut, kemungkinan dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, atau fasilitas publik lainnya. Namun setelah 2017, terjadi tren penurunan, terutama drastis pada tahun 2020 dan 2021, di mana nilai investasi anjlok hingga sekitar Rp170 triliun. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan alokasi anggaran beralih ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Pada 2022 dan 2023, grafik menunjukkan tanda pemulihan, dengan investasi meningkat kembali hingga sekitar Rp270 triliun pada 2023. Ini bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah atau pihak swasta mulai kembali menggenjot pembangunan infrastruktur pasca-pandemi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi.

Faktor terakhir yaitu Pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan situasi ekonomi di dalam suatu Negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai menjadi lebih baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik, maka aktifitas ekonomi masyarakat cenderung baik juga. Kenaikan pendapatan per kapita serta kemampuan daya beli masyarakat yang terus meningkat yang dapat menghasilkan daya konsumsi yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat menghitung atau mengetahui seberapa baik kinerja perekonomian (Alamsyah & Permana, 2018). Dalam penelitian T.B Agung Amaludin dan Anggun Putri Romadhina pada tahun 2023 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka penerimaan pajak daerah juga ikut meningkat (TB. Agung Amaludin & Anggun Putri Romadhina et al, 2023). Dan menurut Dian Triastuti dan Dudi Pratomo pada tahun 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial (Triastuti & Pratomo, 2016). Kasus yang berbeda pada pemerintah Provinsi Bali, ketika pandemic *Covid-19* melanda, penerimaan pajak daerah Provinsi Bali anjlok dikarenakan penurunan jumlah wisatawan serta berhentinya banyak aktivitas perdagangan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi terhadap keberlangsungan perekonomian daerah khususnya penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bali
Tahun 2014-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Grafik di atas menunjukkan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2023 dalam bentuk decimal. Dari tahun 2014 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi terlihat stabil di kisaran 0,49 hingga 0,58, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif sehat dan konsisten dalam periode tersebut. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 di mana pertumbuhan ekonomi menjadi -0,66, yang menunjukkan adanya kontraksi ekonomi akibat dampak besar pandemi COVID-19. Tahun 2021 pun masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,13. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 0,37 dan 0,44, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi mulai bangkit secara perlahan setelah mengalami krisis.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemerintah daerah Bali masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Sebagian pelaku usaha dan

masyarakat masih cenderung melaporkan penghasilan mereka secara tidak akurat atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan, yang secara langsung mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Di samping itu, fluktuasi ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Ketika terjadi perlambatan ekonomi, laba perusahaan dan daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Ketidakpastian ekonomi ini menjadikan tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak semakin kompleks, karena ketidakstabilan tersebut menghambat perencanaan keuangan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi penerimaan pajak daerah di Bali. Penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel tersebut, serta memberikan rekomendasi strategis dalam rangka mengatasi tantangan yang ada. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah Bali dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif, mendorong investasi infrastruktur yang lebih besar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Serta peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Bali”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi tahun yang kelam bagi Negara – Negara yang berada di seluruh dunia terutama di Indonesia karena pada tahun tersebut terjadi pandemi Virus *Corona* yang mempengaruhi berbagai sektor perekonomian Negara khususnya penerimaan pajak daerah (Sucipta dkk.,

2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2020 hingga 2021 penerimaan pajak daerah pada masing – masing kabupaten dan kota di Provinsi Bali mengalami penurunan hingga berada dibawah target anggaran. Dan pada tahun 2022 dan 2023 penerimaan pajak daerah di setiap kota dan kabupaten di Provinsi Bali mulai membaik (Sucipta dkk., 2024).

Fenomena diatas menimbulkan pertanyaan mengenai faktor – faktor seperti jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa hasil deskriptif penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali?
2. Apakah jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Bali?
3. Apakah jumlah penduduk secara parsial dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Bali?
4. Apakah investasi infrastruktur berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Bali?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di Bali?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif dari penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Bali.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Bali.

4. Untuk mengetahui apakah investasi infrastruktur berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Bali.
5. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Bali.

1.5 Batasan penelitian

1. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini hanya terbatas pada observasi yang dilakukan peneliti pada setiap kabupaten dan kota yang terdapat pada Provinsi Bali.
2. Data yang digunakan peneliti pada variabel jumlah penduduk yaitu pada usia produktif manusia yaitu dari umur 15 tahun hingga 65 tahun.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam penerapan teori khususnya terkait topik penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang perpajakan, investasi infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali terutama untuk memengaruhi penerimaan pajak daerah. Serta menambah pengetahuan mengenai hubungan kebijakan pajak daerah, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali.

1.6.2 Aspek Praktis

Berikut merupakan aspek praktis yang peneliti harap dapat membantu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk mengetahui pentingnya pengaruh jumlah penduduk, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keuntungan para investor untuk berinvestasi di Provinsi Bali. Karena dengan diberikannya informasi mengenai kebijakan pajak daerah, maka para investor dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi di Provinsi Bali.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, pembangunan infrastruktur akan menjadi lebih cepat dan wajib pajak dapat menikmati fasilitas publik yang dibangun oleh pajak yang dibayar.

1.7 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Perancangan sistematika tugas akhir bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan pada setiap bab. Sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

b. BAB II TUJUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori mengenai penelitian dan menjelaskan luas serta dalam lingkup penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan hipotesis dari penelitian serta referensi dari penelitian terdahulu.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan mengenai jenis penelitian, identifikasi dari setiap variabel penelitian, definisi operasional yang memuat metode pengukuran, jenis data dan perolehan data, prosedur dalam pemilihan sampel dan penggunaan teknik analisis untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan, membahas, serta memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan untuk pengembangan ilmu.

Halaman ini sengaja dikosongkan